

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Di negara-negara berkembang, ketenagakerjaan sering kali menjadi permasalahan yang berkelanjutan salah satunya di Negara Indonesia. Di Indonesia setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja, tingginya tingkat pengangguran, dan kurangnya penyerapan tenaga kerja. Selain itu juga rendahnya kualitas tenaga kerja yang dapat menghambat pembangunan di Indonesia, ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Tenaga kerja berperan penting dalam melakukan kegiatan pembangunan, dimana tenaga kerja yang berkualitas dapat mendukung pembangunan disuatu negara tersebut. Standar dan kualitas tenaga kerja perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, baik dari jenis maupun kualifikasinya yang cenderung pada kompetensi yang tinggi agar mampu bersaing di pasar kerja baik di tingkat nasional, regional bahkan samapi ke internasional.

Rendahnya tingkat tenaga kerja yang berkualitas mengakibatkan melonjaknya angka pengangguran di Indonesia. Hal ini dikarenakan salah satunya dunia kerja banyak menerima tenaga kerja yang berkualitas tinggi, sehingga angka pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan. Pengangguran itu sendiri bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, kemajuan teknologi, kemampuan

pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan lainnya.

Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang harus segera diatasi, karena semakin tinggi angka pengangguran akan muncul beberapa permasalahan seperti meningkatnya angka kemiskinan, memperlambat proses pembangunan, meningkatnya angka kriminalitas, dan lain sebagainya. Kategori dari pengangguran adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada masa-masa usia kerja. Usia kerja di Indonesia pada umumnya berusia 15 – 64 Tahun, akan tetapi ada yang berpendapat bahwa batas usia kerja adalah diatas 17 Tahun.

Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Timur menyebutkan bahwa selama pandemi covid-19 angka pengangguran terbuka per Agustus 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur menyebutkan bahwa angka penganggura pada pertengahan Tahun 2020 mencapai 5,26% dari total penduduk di Jawa Timur. Selain karena adanya pandemi covid-19, angka pengangguran juga didominasi oleh lulusan dari SMA dan SMK di Jawa Timur (Jatimnet.com). Meningkatnya angka pengangguran juga terdapat di beberapa wilayah di Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Pasuruan. BPS Kabupaten Pasuruan pada pertengahan Tahun 2020 mencatat bahwa jumlah pengangguran terbuka mencapai 5,42% (Wartabromo.com).

Dilihat dari uraian diatas semakin meningkatnya angka pengangguran, sistem pendidikan dan pelatihan kerja merupakan sarana yang relevan dalam memberikan kontribusi dari pengembangan tenaga kerja. Dengan kata lain, semakin tingginya relevansi program pendidikan dan pelatihan kerja maka semakin besar pula

kemampuan masyarakat dalam menghadapi pasar kerja saat ini dengan memiliki *skill* yang berkualitas. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan”. Pelatihan kerja yang diarahkan oleh dinas tenaga kerja diharapkan dapat memberikan *output* yang mampu memberikan kontribusi terutama dalam hal peluang kerja serta penciptaan kesempatan kerja.

Pemerintah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan wadah/tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan. BLK berfungsi untuk melakukan kegiatan pelatihan agar meningkatkan serta mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin dan siap kerja yang dimana pelaksanaannya lebih mengutamakan praktik daripada teorinya. Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif serta produktif, BLK menyusun program pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja agar dapat bersaing di dunia kerja. Adanya pelatihan diharapkan para pencari kerja dan pengangguran dapat meningkatkan keterampilan kerjanya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, selain itu peserta pelatihan dapat menerapkan pengetahuannya dengan berwirausaha secara mandiri.

Pemerintah membuat suatu kebijakan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan tenaga kerja yang berkualitas yang dapat bersaing di pasar kerja. Pemerintah menyediakan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pasuruan yang terdapat pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2018 tentang

Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pasuruan (UPT BLK Pasuruan). UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan bukan hanya memberikan pelatihan kepada angkatan kerja yang putus sekolah akan tetapi kepada tenaga kerja yang belum bekerja (pengangguran) juga.

Dinas Tenaga Kerja bertanggung jawab dalam mengurus masalah ketenagakerjaan telah mengeluarkan kebijakan dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan melalui beberapa pelatihan yang diadakan di beberapa tempat, salah satunya Pada UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan yang telah menyediakan beberapa pelatihan seperti halnya kejuruan teknik otomotif, teknik listrik, teknik elektronika, teknologi informasi dan komunikasi, tata busana, garment apparel, dan lainnya. UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan menyiapkan kejuruan tersebut sesuai dengan kebutuhan pasar kerja agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas dan berkompeten dalam bekerja.

Jumlah lulusan pelatihan di UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan pada tahun 2020 mencapai 102 peserta yang dimana sebelum masa pandemi Covid-19 pada Tahun 2017 lulusan UPT BLK mencapai 1.168 peserta sedangkan angka pengangguran yang dialami Jawa Timur pada Tahun 2020 mencapai 5,84% dari jumlah penduduk Jawa Timur sedangkan pada Tahun 2017 mencapai 4,00%. (BPS.Jatim).

Dilihat uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait seberapa efektif pelatihan di UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan dalam menangani pengangguran.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana efektivitas pelatihan dalam mengatasi pengangguran di UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas pelatihan dalam mengatasi pengangguran di UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan ?

## **I.3 Tujuan**

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pelatihan dalam mengatasi pengangguran di UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat efektivitas pelatihan dalam mengatasi pengangguran di UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan.

## **I.4 Manfaat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas terkait efektivitas pelatihan di UPT Balai Latihan Kerja dalam mengatasi pengangguran.

2. Manfaat praktis

- Bagi masyarakat, adanya penelitian ini agar meningkatnya minat masyarakat dalam mengikuti pelatihan kerja agar kualitas tenaga

kerja semakin meningkat sehingga dapat menurunkan angka pengangguran.

- Bagi instansi, penelitian ini dapat memberikan sumbang saran dan bahan evaluasi mengenai efektivitas pelatihan di UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan dalam menangani pengangguran.
- Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan dalam melakukan penelitian